

LAPORAN TAHUNAN 2024

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Kementerian Perhubungan



IKHTISAR

Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan transportasi yang unggul dan handal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi. Tugas pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan ini kemudian diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan ataupun program yang terdapat dalam Rencana Strategis BPTJ dan Rencana Induk Transportasi yang tertuang pada Rencana Kerja Tahunan dan kemudian realisasi pelaksanaannya dilaporkan pada Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan strategis, baik yang menggunakan APBN maupun non APBN untuk mengembangkan transportasi wilayah Jabodetabek. Kegiatan strategis tersebut yaitu program subsidi angkutan umum *Buy The Service* (BTS), Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg, pembangunan Halte, pembangunan Area Traffic Control System (ATCS), serta kegiatan yang melibatkan masyarakat berupa kegiatan Padat Karya di Terminal Tipe A di lingkungan BPTJ.

Laporan Tahunan selain merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun, juga merupakan salah satu bentuk laporan berkala yang disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon I dan tingkat Kementerian. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan BPTJ Tahun 2024 disusun dengan pendekatan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
PROFIL PIMPINAN	9
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	15
B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	16
C. Komposisi Pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	18
D. Visi dan Misi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	20
BAB II KEGIATAN STRATEGIS	21
A. Peristiwa Penting	21
B. Kegiatan yang melibatkan Masyarakat (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>).....	36
C. Penghargaan	46
BAB III PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi ASN dan Pegawai Honorer.....	19
Tabel 2. 1 Persebaran ATCS tahun 2024.....	33
Tabel 2. 2 Persebaran Alat Counting tahun 2024	34
Tabel 2. 3 pelaksanaan Safety Riding	43
Tabel 2. 4 jumlah peserta pelaksanaan Safety Riding	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPTJ Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022.....	16
Gambar 1. 2 Komposisi PNS Jenjang Pendidikan	19
Gambar 2. 1 Program Subsidi Buy The Service (BTS) Kota Bogor.....	21
Gambar 2. 2 Peresmian Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi di LRT di Kota Bekasi oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 3 Maret 2024	23
Gambar 2. 3 Kegiatan Launching Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi LRT BisKita Trans Depok oleh Menteri Perhubungan, pada tanggal 14 Juli 2024 di Kota Depok	24
Gambar 2. 4 Stasiun Pondok Rajeg.....	26
Gambar 2. 5 Sertifikat Laik Fungsi Stasiun pondok Rajeg	26
Gambar 2. 6 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg	29
Gambar 2. 7 Gambar peresmian Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg oleh Menteri Perhubungan	30
Gambar 2. 8 Dokumentasi Pembangunan Halte BTS di Kota Depok.....	32
Gambar 2. 9 Dokumentasi Halte BTS di Kota Bekasi	32
Gambar 2. 10 Dokumentasi Comand Center Room di Kantor Pusat BPTJ	36
Gambar 2. 11 Gambar Pengecoran Jalan Area Masuk Terminal.....	38
Gambar 2. 12 Gambar Pengerjaan Penambalan Dinding Tembok Luar	38
Gambar 2. 13 Gambar Pembuatan Jalur Landai.....	39
Gambar 2. 14 Perapihan Taman Terminal Tipe A Poris Plawad	40
Gambar 2. 15 Perbaikan Jalan Di Area Depan Terminal Tipe A Baranangsiang.....	41
Gambar 2. 16 Pengecatan Area Kantor Terminal Tipe A Baranangsiang	41
Gambar 2. 17 Gambar Pembersihan Saluran Irigasi Terminal Tipe A Jatijajar.....	42
Gambar 2. 18 Gambar Pembersihan Saluran Irigasi Terminal Tipe A Jatijajar.....	42
Gambar 2. 19 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi <i>Safety Riding</i> dilaksanakan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD di Kabupaten Bekasi Angkatan III dan IV	45
Gambar 2. 20 Dokumentasi Pendampingan Kegiatan Sosialisasi <i>Safety Riding</i> Di Citra Raya Tangerang, Kabupaten Tangerang Tanggal 17-19 Agustus 2024	46
Gambar 2. 21 Pemberian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	47
Gambar 2. 22 Pemberian Penghargaan Apresiasi Pejuang Integritas tahun 2024	48

PROFIL PIMPINAN

PIMPINAN TINGGI MADYA

PERIODE JANUARI 2024 S.D. APRIL 2024

PERIODE SEPTEMBER 2024 S.D. SEKARANG



Suharto, ATD, Lahir di Magelang, 25 September 1966. Lulusan D3 Balai Diklat ALLAJR tahun 1988, D4 Pusdiklat Perhubungan Darat pada tahun 1991 dan menyelesaikan studi S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta pada tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas LLAJ Kota Bogor pada tahun 2011 - 2014, Asisten Setda Kota Bogor pada tahun 2014, Kepala Bappeda Kota Bogor pada tahun 2015 - 2016, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2016, Ketua STTD pada tahun 2017 - 2019, Sekretaris BPSDM Perhubungan pada tahun 2019, Kepala PPSDM Perhubungan Darat pada tahun 2019. Setelah itu beliau melanjutkan karirnya menjadi Direktur Lalu Lintas Jalan, Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2020, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat mulai dari tahun 2021, saat ini beliau menjadi Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi, beliau juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mulai dari November 2024 sampai dengan sekarang.

PERIODE MEI 2022 S.D. SEPTEMBER 2024



Dr. Tatan Rustandi, Lahir di Garut, 23 Maret 1966. Beliau menempuh pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2019 dan Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun 2021, beliau juga menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sampai dengan bulan September 2024.

PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PERIODE MEI 2024 S.D. SEKARANG



Sekretaris Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek

DEDY CAHYADI, S.SiT., MT.

Dedy Cahyadi, S.SiT., MT, Lahir di Tangerang, 22 September 1973. Menamatkan pendidikan terakhirnya S2 Master Of Commerce And Administration di Universitas Gajah Mada pada tahun 2002.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang KUR, Bahan dan Alat Pengajaran pada Tahun 2004-2006, Kepala Bidang Penyusunan Program pada tahun 2006-2010, Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat padat Tahun 2010-2013, Kepala Bidang Pelatihan Pusbang SDM Perhubungan Darat Tahun 2013 - 2015, Kepala Sub Direktorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II pada Tahun 2015-2016, Kepala Sub Direktorat Kelaikan Sarana Wilayah II Direktorat Sarana Perkeretaapian pada tahun 2016-2018, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat BPSDMP pada tahun 2018, Kepala Bagian Umum pada tahun 2018-2019, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada tahun 2019-2020, setelah itu beliau melanjutkan karirnya menjadi Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada tahun 2019-2020, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda pada tahun 2020-2021, Direktur Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2021, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN pada tahun 2021-2022, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun 2022-2024, dan pada saat bulan mei tahun 2024 beliau menjadi Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sampai dengan sekarang.

PERIODE JANUARI S.D. SEKARANG



Direktur Lalu Lintas Badan
Pengelola Transportasi
Jabodetabek

SIGIT IRFANSYAH, ATD., M.Sc.

Sigit Irfansyah, ATD, M.Sc, Lahir di Jakarta, 15 Oktober 1965. alumni D-III LLAJ STTD Tahun 1988. Kemudian menyelesaikan D-IV Transportasi Darat di kampus yang sama tahun 1994, sebelum akhirnya mengambil S-2 Transportasi di University Of South Australia lulus tahun 1997.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2013, Kepala Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan Pada Tahun 2014, Beliau melanjutkan karirnya menjadi Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan pada Tahun 2015, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada Tahun 2016, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD pada Tahun 2016, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Tahun 2017, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada tahun 2020, saat ini beliau menjadi Direktur Lalu Lintas, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sampai dengan sekarang.

PERIODE JANUARI S.D. SEKARANG



Direktur Prasarana Badan
Pengelola Transportasi
Jabodetabek

Ir. ZAMRIDES, M.Si

Ir. Zamrides, M.Si, Lahir di Solok, 23 Desember 1966, Pendidikan terakhir adalah S2 Ekonomika Pembangunan Universitas Gajah Mada pada tahun 2006.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Angkutan Antar Kota LLAK pada tahun 2005-2008, Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Wilayah pada tahun 2008-2009, kepala Sub Direktorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api pada tahun 2014, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Barat pada tahun 2014-2016, Kepala Sub Direktorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2016-2017, Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada tahun 2017, Beliau melanjutkan karirnya menjadi Direktur Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2019, Direktur Lalu Lintas pada tahun 2021, Direktur Prasarana di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2022, Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2022 dan saat ini beliau menjadi Direktur Prasarana, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

PERIODE SEPTEMBER S.D. SEKARANG



Solihin Purwantara, S.SiT, Lahir di Bandung, 26 Oktober 1969. Beliau menempuh pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada tahun 2004.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Angkutan Orang, Direktorat Angkutan di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2019-2022, Kepala Sub Direktorat Angkutan Barang, Direktorat Angkutan di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2022 s.d sekarang, mulai Bulan September tahun 2024 sampai sekarang beliau menjabat juga menjadi Plt. Direktur Angkutan di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Tugas dan fungsi BPTJ sebagaimana tertuang dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTJ menjalankan fungsinya sebagai berikut:

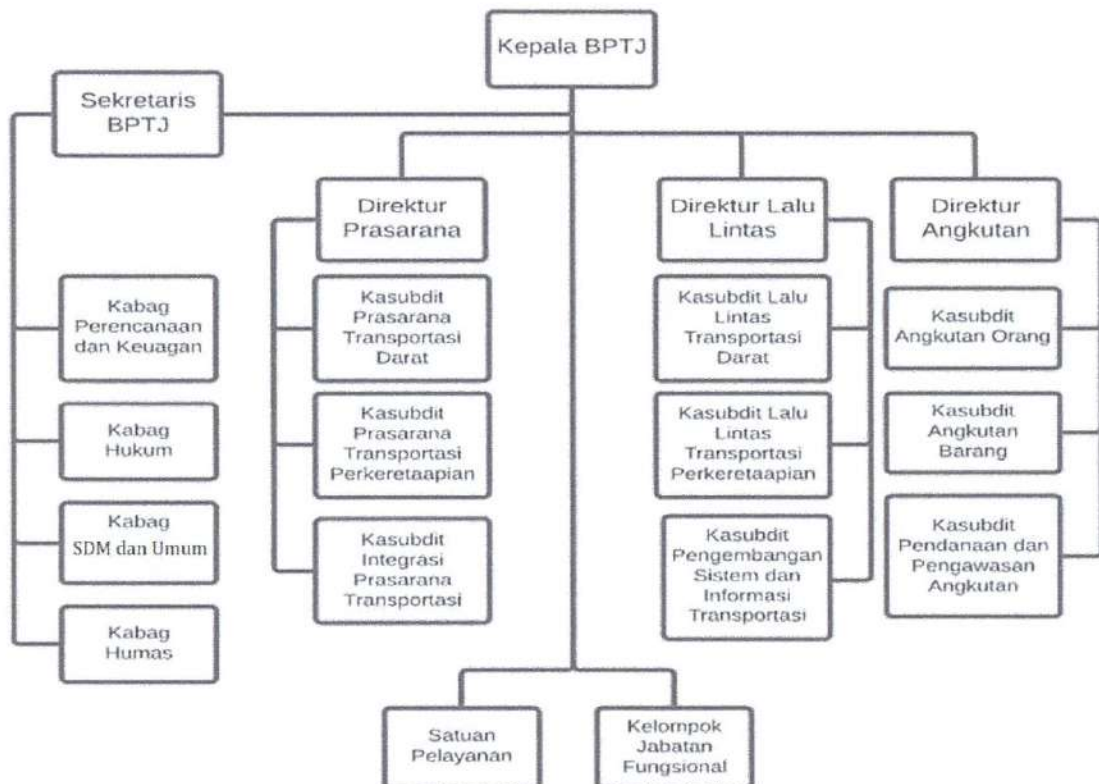
- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam RITJ yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- g. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal.
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).
- j. Pementauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum

serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

- k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RITJ yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Susunan organisasi BPTJ sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPTJ Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Unit Kerja Eselon II mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
 - c. Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum;
 - d. Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jabodetabek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.
3. Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di

wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jabodetabek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi di wilayah Jabodetabek.
4. Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jabodetabek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek.

C. Komposisi Pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam berjalannya suatu organisasi. BPTJ tercatat memiliki pegawai sebanyak 559 pegawai.

1. SDM Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Berdasarkan Komposisi ASN dan Pegawai Honorer

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2024 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 559 Pegawai, yang terdiri dari 286 PNS, 13 PPPK, 95 PPNP, 22 Caraka, 62 Kebersihan, 69 Security, dan 12 Pengemudi, dengan komposisi sebagai berikut:

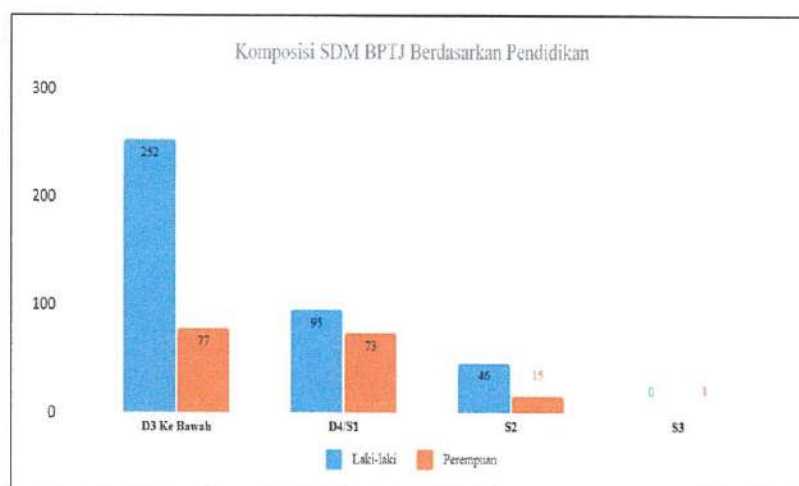
Tabel 1. 1 Komposisi ASN dan Pegawai Honorer

Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNP	Caraka	Kebersihan	Security	Pengemudi	Total
Sekretariat	52	4	24	3	12	3	10	108
Dit. Prasarana	50	1	12	1	0	0	0	64
Dit. Lalu Lintas	56	4	6	4	0	0	0	70
Dit. Angkutan	60	4	9	7	1	0	0	81
T. Pondok Cabe	12	0	6	0	10	14	0	42
T. Jatijajar	22	0	15	2	17	19	1	76
T. Poris Plawad	17	0	8	2	13	17	1	58
T. Baranangsiang	17	0	15	3	9	16	0	60
TOTAL	286	13	95	22	62	69	12	559

Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2024

2. SDM PNS Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Berdasarkan Pendidikan

Pada tahun 2022, PNS yang ada dalam Unit Kerja BPTJ memiliki background Pendidikan yang berbeda-beda, dapat dilihat pada grafik tabel ada beberapa jenjang Pendidikan yang ada pada PNS di BPTJ yaitu, jenjang D3 ke bawah (SD, SLTP, SLTA, D1, D2, dan D3) sejumlah 329 pegawai, D4/S1 sejumlah 168 pegawai, S2 sejumlah 61 pegawai, dan S3 sejumlah 1 pegawai. Dalam hal ini tercatat bahwa BPTJ memiliki pegawai PNS yang paling banyak lulusan pada jenjang pendidikan D3 ke bawah yaitu sebanyak 329 pegawai.



Gambar 1. 2 Komposisi PNS Jenjang Pendidikan
Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2024

D. Visi dan Misi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Dalam menjalankan tugas nya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai visi dan misi. Visi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BPTJ 2020-2024, yaitu “Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang berupaya mewujudkan Konektivitas Jabodetabek yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; dan
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.

BAB II KEGIATAN STRATEGIS

A. Peristiwa Penting

1. BTS Bogor

Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) atau BTS sejak Tahun 2020 untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator.

Pada November 2021 BPTJ melalui perjanjian Kerjasama dengan kota Bogor telah menyelenggarakan pelayanan angkutan umum perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) sampai dengan tahun 2023 di Kota Bogor, dengan jumlah 4 koridor yaitu:

Pada tahun 2024, jumlah penumpang pada BTS Bogor yaitu:

1. Koridor 1: Terminal Bubulak – Cidangiang, dengan total penumpang 898.990
2. Koridor 2: Terminal Bubulak (via Cidangiang) – Ciawi, dengan total penumpang 1.434.232
3. Koridor 5: Terminal Ciparigi – Stasiun Bogor, dengan total penumpang 685.375
4. Koridor 6: Parung Banteng – Air Mancur, dengan total penumpang 307.579

Pada November 2024 dilakukan addendum perjanjian kerja sama pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan Biskita Trans Pakuan kepada Pemerintah Kota Bogor.



Gambar 2. 1 Program Subsidi Buy The Service (BTS) Kota Bogor

2. BTS Bekasi

Pada bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan perjanjian Kerjasama BPTJ dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk pelayanan angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service, dan didalamnya ditetapkan 1 koridor yaitu koridor Summarecon Bekasi - Vida.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian BISKITA Trans Bekasi Patriot, di Halte BTS Mall Sumarecon Bekasi, yang dapat

mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya yaitu LRT Jabodebek dan Kereta Rel Listrik (KRL). Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad pun menyambut baik kehadiran Biskita Bekasi Trans Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi akan siap mendukung agar layanan ini bisa beroperasi dengan baik dan bermanfaat banyak bagi khalayak luas. Biskita Trans Bekasi Patriot akan beroperasi sebanyak 15 unit bus yang melayani penumpang mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan waktu tunggu (headway) sekitar 10 menit dan selama masa uji coba layanan ini masyarakat dapat mengaksesnya secara gratis.

Adapun rute atau koridor yang tersedia saat ini adalah Summarecon Bekasi – Vida, rencananya akan memiliki 47 halte/bus stop dengan rincian 21 halte/bus stop dari rute Summarecon – Vida dan 26 bus stop dari Vida – Summarecon dengan terintegrasi langsung dengan Halte LRT Bekasi Barat Revo Town Mall.

Kegiatan layanan operasional Biskita Trans Bekasi Patriot merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yaitu layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat mengaksesnya secara gratis.

Jumlah penumpang koridor Summarecon Bekasi – Vida pada tahun 2024 sebesar 528.594 penumpang





Gambar 2. 2 Peresmian Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi di LRT di Kota Bekasi oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 3 Maret 2024

3. **BTS Depok**

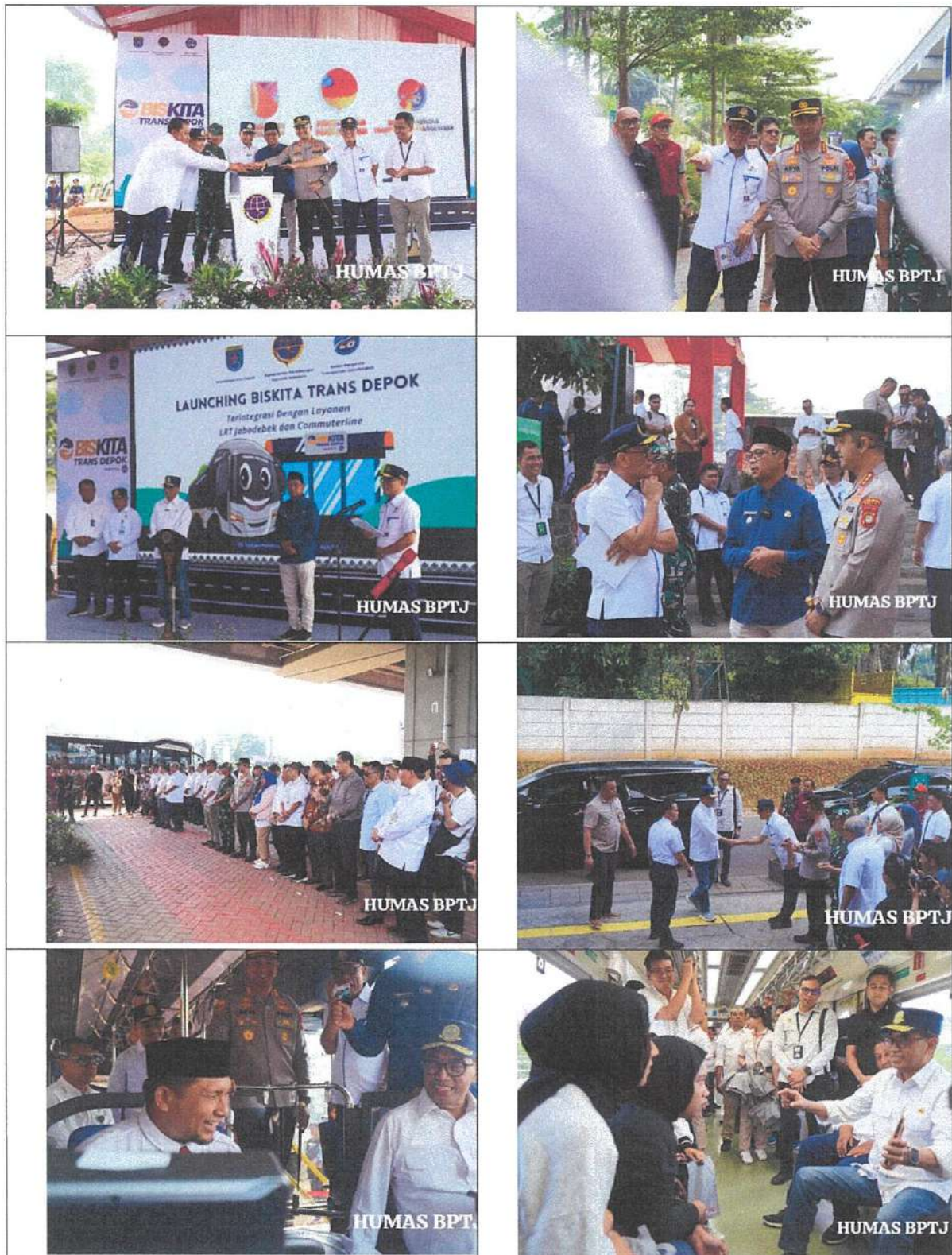
Pada bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan perjanjian Kerjasama BPTJ dengan Pemerintah Kota Depok untuk pelayanan angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service, dan didalamnya ditetapkan 1 koridor yaitu koridor Terminal Depok – LRT Harjamukti.

Pada tanggal 14 Juli 2024 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan pengoperasian BisKita Trans Depok, di Stasiun LRT Harjamukti, yang dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Depok karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya yaitu LRT Jabodebek dan Kereta Rel Listrik (KRL). BisKita Trans Depok melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.

BisKita Trans Depok akan beroperasi sebanyak 15 unit bus yang melayani penumpang mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan waktu tunggu (*headway*) sekitar 10 menit dan selama masa uji coba layanan ini masyarakat dapat mengaksesnya secara gratis. Kegiatan peresmian *Launching* layanan operasional BisKita Trans Depok merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yaitu layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat mengaksesnya secara gratis.

Adapun rute atau koridor yang tersedia saat ini adalah Terminal Depok, Margonda – Stasiun LRT Harjamukti tersebut total akan ada sebanyak 48 halte/bus stop dengan rincian sebanyak 24 halte/bus stop. Terintegrasi langsung dengan Halte LRT Harjamukti dan Stasiun KRL Depok Baru di Terminal Depok, Margonda.

Jumlah penumpang koridor Terminal Depok – LRT Harjamukti pada tahun 2024 sebesar 890.904 penumpang



Gambar 2. 3 Kegiatan Launching Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi LRT BisKita Trans Depok oleh Menteri Perhubungan, pada tanggal 14 Juli 2024 di Kota Depok

4. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg

Stasiun Pondok Rajeg merupakan stasiun kelas kecil yang berlokasi pada KM 41+480 Lintas Citayam – Nambo. Pembangunan Stasiun Pondok Rajeg didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018 – 2029 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

Adapun kondisi eksisting Lintas – Citayam Nambo yaitu:

1. Jalur tunggal ± 13 km.
2. KRL yang melintas memiliki stamformasi 10 kereta.
3. Frekuensi operasi KRL sebanyak 22 perjalanan dan beberapa perjalanan angkutan barang (batubara dan semen)

Dasar Pelaksanaan kegiatan Pembangunan ini sebagai berikut:

- a. Perpres 55/2018 tentang RITJ – Pilar 2 (target pelaksanaan Tahun 2018-2019)
- b. Perpres 60/2020 tentang RTR Jabodetabekpunjur
- c. Perda Kab Bogor 11/2016 tentang RTR Kab Bogor Tahun 2016-2036

Tujuan Pembangunan sebagai berikut:

- Meningkatkan pengguna moda transportasi umum dan keterjangkauan layanan angkutan umum (coverage area).
- Mendukung pengamanan aset.
- Mengurai penumpukan penumpang di Stasiun Cibinong dan Stasiun Nambo.
- Mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah Pondok Rajeg dan Gunung Putri.
- Meningkatkan headway operasi KA.

Ruang lingkup pekerjaan tahun 2023 sebagai berikut:

- Pekerjaan Bangunan Utama Stasiun – struktur atas
- Pekerjaan Arsitektur
- Pekerjaan MEP
- Pekerjaan Atap Peron
- Pekerjaan Akses Jalan Utama
- Pekerjaan Lanskap dan Pekerjaan Bangunan Penunjang
- Perencanaan fasilitas integrasi akan dilaksanakan oleh Pemda

Telah selesai dilaksanakan pekerjaan konstruksi dan supervisi Stasiun Pondok Rajeg (Mei s.d. November 2023), dan saat ini dalam tahap jaminan pemeliharaan (Desember 2023 s.d. Mei 2024). Tahap selanjutnya yaitu persiapan pengoperasian Stasiun (direncanakan tahun 2024)



Gambar 2. 4 Stasiun Pondok Rajeg



Gambar 2. 5 Sertifikat Laik Fungsi Stasiun pondok Rajeg

Tahun 2024 BPTJ telah memenuhi perizinan yang diperlukan untuk membangun bangunan stasiun, beberapa perizinan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kota Depok - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Tahun 2024;
2. Penilaian Sistem Keselamatan dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) oleh Direktorat Lalu

Lintas Angkutan Kereta Api Tahun 2024;

3. Sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian untuk emplasemen, peron, dan stasiun kereta api telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024.
4. Inetgrasi dengan angkutan umum perkotaan: D.08 (Terminal Depok – Kp. Sawah) dan D.09-D.10 (Terminal Depok – Kalimulya)

Setelah BPTJ melaksanakan dan menyelesaikan proses perizinan dalam mendirikan bangunan, tepat pada tanggal 19 oktober 2024, Stasiun Pondok Rajeg akhirnya sampai pada tahap peresmian serta pengoperasian oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi.

Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg

1. Pengangkatan/ Penyesuaian Kelandaian *Track/ Jalur KA*



Sebelum



Sesudah

2. Penyesuaian Ketinggian Listrik Aliran Atas



Sebelum



Sesudah

3. Struktur Bawah Peron



Sebelum



Sesudah

4. Struktur Bawah Bangunan Stasiun



Sebelum



Sesudah

5. Struktur Atap Peron



Sebelum



Sesudah

6. Struktur Atas Bangunan Stasiun



Sebelum



Sesudah

7. Arsitektur Stasiun



Sebelum



Sesudah

8. Fasad dan Landsekap



Sebelum



Sesudah

Peresmian dan Pengoperasian Stasiun Pondok Rajeg

Gambar 2. 6 Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg





Gambar 2. 7 Gambar peresmian Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg oleh Menteri Perhubungan

B. Penyediaan Infrastruktur

1. Pembangunan Halte

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum (bus) untuk menaik dan menurunkan penumpang. Halte merupakan salah satu fasilitas pendukung

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Pasal 45 UU 22/2009 LLAJ dan Pasal 113 PP 79/2013 tentang Jaringan LLAJ. Fungsi dari halte tidak hanya menaikkan dan menurunkan penumpang melainkan agar bus tidak menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Dampak yang terjadi apabila bus menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan, yaitu: menimbulkan kemacetan di jalan raya, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penumpang dengan pengendara kendaraan bermotor lainnya, dan lalu lintas menjadi tidak tertib. Pada tahun 2024 Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat, Direktorat Prasarana BPTJ melakukan pembangunan Halte BTS, sebagai berikut:

- Pembangunan Halte Pendukung Program BTS Angkutan Umum Kota Depok - Tahun Anggaran 2024
- 2. Pembangunan Halte Paket 1
 - Pembangunan 6 Halte
 - Pembangunan 4 Tempat Pemberhentian Bus (TPB)

Rincian pada Jalan Tole Iskandar

1. Halte Panus 1
2. Halte Panus 2
3. TPB Griya Depok Asri
4. Halte Raden Saleh
5. Halte Sukmajaya 1
6. Halte Simpangan 1
7. TPB Simpangan 2

Rincian pada Jalan Raya Bogor:

1. TPB Deppen 1
 2. Halte RS Sentra Medika
 3. TPB Cisalak 2
3. Pembangunan Halte Paket 2
 - Pembangunan 2 Halte

Rincian pada Jalan Margonda Raya:

1. Halte Balaikota 1
2. Halte Balaikota 2



Gambar 2. 8 Dokumentasi Pembangunan Halte BTS di Kota Depok

- Pembangunan Halte Pendukung Program BTS Angkutan Umum Kota Bekasi - Tahun Anggaran 2024

Pembangunan halte dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) terdiri dari:

- Pembangunan 2 Unit Halte;
- Pembangunan 1 Tempat Pemberhentian Bus (TPB).



Gambar 2. 9 Dokumentasi Halte BTS di Kota Bekasi

2. Pengadaan dan Pengoperasian ATCS dan Alat Counting

Area Traffic Control System atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS merupakan suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap simpang. Pengembangan ATCS diharapkan dapat bekerja menentukan lama penyalan masing - masing lampu APILL secara otomatis berdasar distribusi kepadatan kendaraan.

Fungsi ATCS sebagai sendiri sebagai berikut:

1. Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi;
2. dalam keadaan tertentu, memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Mobil Damkar, Ambulance, Transportasi umum)
3. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan;
4. Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya.

Sedangkan manfaat yang diterima dari adanya ATCS tersebut adalah:

1. Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan
2. Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan aman, selamat, dan berwawasan lingkungan
3. Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.

Pembangunan pada tahun 2024 sebanyak 4 titik simpang. Rincian persebaran ATCS tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Persebaran ATCS tahun 2024

No	Nama Simpang	Lat, Long	Segmen/Ruas Jalan Nasional	Kota/Kabupaten	Provinsi	Tahun Pembangunan	Fasilitas Jalur Sepeda
1	Simpang Bin Nuh	- 6.557409000, 106.77220000	Curugmekar, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	2024	
2	Simpang Kemang Bomang	- 6.475756000, 106.729198000	Jl. Jkt - Bogor, Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310	KAB. BOGOR	JAWA BARAT	2024	
3	Simpang Cileungsi	- 6.404459000, 106.963123100	Jl. Raya Narogong, Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820	KAB. BOGOR	JAWA BARAT	2024	

4	Simpang 3 Telaga Bestari	- 6.2009000 00, 106.48040 2000	Cibadak, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten	KAB. TANGER ANG	BANTEN	2024	
---	--------------------------------	--	---	-----------------------	--------	------	--

ATCS tersebut dikelola melalui CC Room yang berlokasi di Lantai 15 Gedung Karya Kementerian Perhubungan yang berfungsi untuk memantau dan mengatur lalu lintas di persimpangan. CC Room juga terintegrasi dengan ATCS milik pemerintah daerah yang tersebar di 18 titik persimpangan. Sebaran ATCS yang dibangun Direktorat Lalu Lintas dapat dilihat dibawah ini:

Salah satu kelengkapan dari ATCS yaitu Alat Counting yang dapat berfungsi untuk menghitung arus lalu lintas pergerakan kendaraan pada ruas jalan yang dipantau. Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh alat dan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: (1) sepeda motor, (2) kendaraan kecil (minibus), dan (3) kendaraan besar (bus/truk). Pembangunan alat counting sebanyak 7 ruas di tahun 2024. Data arus lalu lintas dari Alat Counting membantu dalam proses perencanaan dan pengendalian penanganan kemacetan di wilayah Jabodetabek. Rincian persebaran Alat Counting tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Persebaran Alat Counting tahun 2024

No	Nama Aset	Tipe Aset	Lat, Long	Alamat Segmen/Ruas Jalan Nasional	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Keterangan Aset Terpasang	Tahun Pembangun an
1	Ruas Jalan Raya Bogor (Kedung Halang)	ALAT COUNTING	-6.555926, 106.816471	Jl. Raya Jakarta-Bogor No.9, RT.03/RW.03, Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	LOKASI DALAM KOTA	2024
2	Ruas Jalan Raya Tajur (Dishub Kota Bogor)	ALAT COUNTING	-6.628465, 106.823479	Jl. Nasional 11 69-81, RT.04/RW.01, Tajur, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16134	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	LOKASI DALAM KOTA	2024
3	Ruas Jalan Raya Serang (Balaraja Barat)	ALAT COUNTING	-6.194402, 106.459745	Jl. Raya Serang, Balaraja, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten 15610	KABUPATEN TANGERA NG	BANTE N	LOKASI DALAM KOTA	2024
4	Ruas Jalan Imam	ALAT COUNTING	-6.268390800,	Jl. Raya Teuku Umar, Telaga Asih, Kec. Cikarang Bar.,	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	LOKASI DALAM KOTA	2024

	Bonjol (Cibitung)		107.08346 6300	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530				
5	Ruas Jalan Fatahillah (Cikarang)	ALAT COUNTI NG	- 6.2648050 00, 107.13687 7000	Jl. Raya Fatahillah 3-11, Kalijaya, Kec. Cikarang Bar., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530	KABUPAT EN BEKASI	JAWA BARAT	LOKASI DALAM KOTA	2024
6	Ruas Jalan Ahmad Yani (Kayu Ringin)	ALAT COUNTI NG	- 6.2414792 00, 106.99297 6700	Jl. Ahmad Yani, RT.004/RW.003, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	LOKASI DALAM KOTA	2024
7	Ruas Jalan Transyog i (Cileungs i)	ALAT COUNTI NG	-6.402589, 106.96011 4	Jl. Alternatif Cibubur 30-55, Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820	KABUPAT EN BOGOR	JAWA BARAT	LOKASI KORIDOR LUAR	2024

Berikut Dokumentasi Kegiatan ATCS :
Pengoperasian ATCS





Gambar 2. 10 Dokumentasi Comand Center Room di Kantor Pusat BPTJ

C. Kegiatan yang melibatkan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

1. Padat Karya

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE): Instruksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.

4 Kelompok Fokus Intervensi Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas:

1. Peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan infrastruktur dasar melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, diantaranya melalui Program Padat Karya
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, diantaranya melalui Vokasi dan Pelatihan Kerja
3. Peningkatan Kapasitas UMKM diantaranya melalui peningkatan akses pasar dan pendampingan usaha
4. Peningkatan akses pembiayaan UMKM, diantaranya melalui peningkatan akses terhadap Lembaga keuangan.

Dalam hal ini BPTJ melakukan beberapa program padat karya dalam membantu presiden yang tersebar di berbagai wilayah yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Kegiatan Padat Karya Yang Dilaksanakan Bptj Tahun Anggaran 2024

No	Nama Rincian Output	Nama Provinsi
1	Operasional Terminal Tipe A Pondok Cabe	Banten
2	Operasional Terminal Tipe A Jatijajar	Jawa Barat
3	Operasional Terminal Tipe A Poris Plawad	Banten
4	Operasional Terminal Tipe A Baranangsiang	Jawa Barat

1. Operasional Terminal Tipe A Pondok Cabe

Dalam rencana pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya I Terminal Tipe A Pondok Cabe dilakukan berdasarkan Triwulan I, II, III, dan IV. Berdasarkan pada tabel berikut terdapat jumlah tenaga kerja dari triwulan I sampai dengan IV yang dilaksanakan di lingkungan BPTJ Tahun 2024

Tabel Jumlah Tenaga Kerja Padat Karya Pada Terminal Tipe A Pondok Cabe

No	Nama Rincian Output	Realisasi		
		Tenaga Kerja		Anggaran
		Total Orang	Total HOK	Total Upah
1	Operasional Terminal Tipe A Pondok Cabe	230	1,210	181,500,000

Sumber Matriks Dukung PKE

Dalam pelaksanaannya padat karya Terminal Tipe A Pondok Cabe memiliki beberapa kegiatan sebagai berikut.

Padat Karya Terminal Pondok Cabe

- Pengecoran Jalan Area Masuk Terminal (Gerbang Terminal)

Pengecoran jalan area masuk Terminal merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan jalan tersebut merupakan area masuk dan keluarnya bus serta kendaraan lainnya. Pengecoran dilakukan karena kondisi saat hujan tergenang dan struktur yang tidak merata. Berikut area pekerjaan yang dimaksud



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 11 Gambar Pengecoran Jalan Area Masuk Terminal

- Penambalan Dinding Tembok Pagar Terminal (Dalam Dan Luar)

Tembok pagar Terminal merupakan pembatas antara wilayah Terminal dengan wilayah masyarakat umum. Tembok pagar tersebut kondisinya banyak yang berlubang dan sering digunakan oleh oknum untuk memanjat masuk ke area Terminal. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu dilakukan perbaikan demi menjaga keamanan di Terminal.



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 12 Gambar Pengerjaan Penambalan Dinding Tembok Luar

2. Operasional Terminal Tipe A Poris Plawad

Dalam rencana pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya Terminal Tipe A Poris Plawad dilakukan berdasarkan Triwulan I, II, III, dan IV. Berdasarkan pada tabel berikut terdapat jumlah tenaga kerja dari triwulan I sampai dengan IV yang dilaksanakan di lingkungan BPTJ Tahun 2024

Tabel Jumlah Tenaga Kerja Padat Karya Pada Terminal Tipe A Poris Plawad

No	Nama Rincian Output	Realisasi		
		Tenaga Kerja		Anggaran
		Total Orang	Total HOK	Total Upah
1	Operasional Terminal Tipe A Poris Plawad	265	1,410	211,500,000

Padat Karya Terminal Poris Plawad

- Pembuatan Jalur Landai
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan tinggi permukaan tanah didalam dan diluar fasilitas agar mempermudah akses kursi roda/kruk dan mempermudah aksesibilitas trolley



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 13 Gambar Pembuatan Jalur Landai

- Pembersihan taman
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat taman menjadi lebih bersih dan indah dengan mengganti tanaman dan membersihkan taman tersebut



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 14 Perapihan Taman Terminal Tipe A Poris Plawad

3. Operasional Terminal Tipe A Baranangsiang

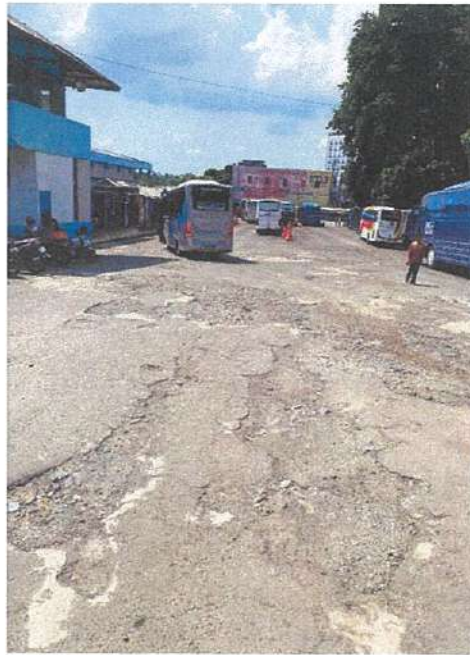
Baranangsiang dilakukan berdasarkan Triwulan I, II, III, dan IV. Berdasarkan pada tabel berikut terdapat jumlah tenaga kerja dari triwulan I sampai dengan IV yang dilaksanakan di lingkungan BPTJ Tahun 2024

Tabel Jumlah Tenaga Kerja Padat Karya Pada Terminal Tipe A Baranangsiang

No	Nama Rincian Output	Realisasi		
		Tenaga Kerja		Anggaran
		Total Orang	Total HOK	Total Upah
1	Operasional Terminal Tipe A Baranangsiang	290	1,520	228,000,000

Padat Karya Terminal Baranangsiang

- Perbaikan Jalan Di Area Depan Terminal Tipe A Baranangsiang



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 15 Perbaikan Jalan Di Area Depan Terminal Tipe A Baranangsiang

- Pengecatan Area Kantor Terminal Tipe A Baranangsiang



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 16 Pengecatan Area Kantor Terminal Tipe A Baranangsiang

4. Operasional Terminal Tipe A Jatijajar

Dalam rencana pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya Terminal Tipe A Jatijajar dilakukan berdasarkan Triwulan I, II, III, dan IV. Berdasarkan pada tabel berikut terdapat jumlah tenaga kerja dari triwulan I sampai dengan IV yang dilaksanakan di lingkungan BPTJ Tahun 2024.

Tabel Jumlah Tenaga Kerja Padat Karya Pada Terminal Tipe A Jatijajar

No	Nama Rincian Output	Realisasi		
		Tenaga Kerja		Anggaran
		Total Orang	Total HOK	Total Upah
1	Operasional Terminal Tipe A Jatijajar	275	1,460	219,000,000

Padat Karya Terminal Tipe A Jatijajar
- Pembersihan saluran Irigasi



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 17 Gambar Pembersihan Saluran Irigasi Terminal Tipe A Jatijajar
- Pengecatan minor



Sebelum



Sesudah

Gambar 2. 18 Gambar Pembersihan Saluran Irigasi Terminal Tipe A Jatijajar

2. Safety Riding

Safety Riding atau keselamatan berkendara merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat bahaya sehingga memaksimalkan keselamatan dalam berkendara, menciptakan kondisi yang tidak akan membahayakan pengendara lain, dan memahami akan pencegahan serta penanggulangannya. Perilaku safety riding diharapkan dilakukan oleh pengendara terutama kendaraan roda dua. hal ini sangat diperlukan mengingat sepeda motor merupakan kendaraan mayoritas yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah sepeda motor, terjadi pula peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor.

Tingginya tingkat kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, mendorong beberapa pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan cara pengenalan perilaku berkeselamatan salah satunya yaitu dengan kegiatan kampanye tentang pentingnya safety riding. Kegiatan sosialisasi safety riding ini adalah salah satu cara untuk mengawal penekanan angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara bermotor roda dua, kegiatan ini juga berguna dalam melakukan manajemen keselamatan transportasi di perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek dengan sasaran adalah perilaku pengendara dan kelengkapan atribut.

Output yang diharapkan dengan dilaksanakannya safety riding diharapkan dapat menerapkan perilaku berkendara yang berkeselamatan khususnya bagi pengendara di wilayah Jabodetabek. Lokasi kegiatan sosialisasi safety riding dilaksanakan di PTDI STTD, Kabupaten Bekasi dan Pelataran Masjid Ash-Shomad, Citra Raya, Tangerang. Kegiatan ini dimulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober dengan jumlah peserta 150 di masing-masing lokasi dengan total peserta 1.500 orang.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi *Safety Riding* dilakukan di ruang tertutup dan ruang terbuka (*indoor & outdoor*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Indoor*: dilaksanakan di dalam suatu ruangan yang representatif, dilengkapi dengan perangkat/peralatan sosialisasi yang memadai untuk penyampaian materi *safety riding*.
- b. *Outdoor*: dilaksanakan di luar ruangan (lapangan) yang representatif, dilengkapi dengan perangkat/peralatan sosialisasi yang memadai untuk melakukan praktek *safety riding*

Pada tahun 2024, kegiatan Safety Riding dilaksanakan di empat kota di wilayah jabodetabek, di antaranya:

Tabel 2. 3 pelaksanaan Safety Riding

No	Angkatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	I	Sabtu, 29 Juni 2024	PTDI-STTD
2	II	Minggu, 30 Juni 2024	PTDI-STTD
3	III	Sabtu, 20 Juli 2024	PTDI-STTD
4	IV	Minggu, 21 Juli 2024	PTDI-STTD
5	V	Sabtu, 3 Agustus 2024	PTDI-STTD
6	VI	Minggu, 4 Agustus 2024	PTDI-STTD
7	VII	Sabtu, 24 Agustus 2024	PTDI-STTD
8	VIII	Minggu,	PTDI-STTD
9	IX	Sabtu, 19 September 2024	Citra Raya, Tangerang
10	X	Minggu, 5 Oktober 2024	PTDI-STTD

Kegiatan Safety Riding yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas juga dihadiri sekitar 1.500 orang yang terdiri dari masyarakat pengguna jalan, khususnya komunitas, generasi muda, dan masyarakat luas di wilayah jabodetabek dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 jumlah peserta pelaksanaan Safety Riding

No	Angkatan	Jumlah
1	I	150 Orang
2	II	150 Orang
3	III	150 Orang
4	IV	150 Orang
5	V	150 Orang
6	VI	150 Orang
7	VII	150 Orang
8	VIII	150 Orang
9	IX	150 Orang
10	X	150 Orang



Gambar 2. 19 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi *Safety Riding* dilaksanakan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD di Kabupaten Bekasi Angkatan III dan IV





Gambar 2. 20 Dokumentasi Pendampingan Kegiatan Sosialisasi Safety Riding Di Citra Raya Tangerang, Kabupaten Tangerang Tanggal 17-19 Agustus 2024

D. Penghargaan

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

BPTJ yang merupakan badan publik, dalam era keterbukaan informasi saat ini, dituntut untuk dapat berbenah diri melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya "Obligation to tell" bagi pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (Public right to know).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana BPTJ sebagai PPID Pelaksana. BPTJ sejak tahun 2019, secara rutin melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan, serta mengelola permohonan informasi masyarakat yang masuk melalui website PPID Kemenhub. Setiap tahunnya selalu dilaksanakan evaluasi baik mengenai sumber daya, teknis pelaksanaan maupun tindak lanjut permohonan informasi publik yang diterima.

Di Tahun 2024, Komisi Informasi Pusat telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Kemenhub. Dalam penilaian tersebut, BPTJ berhasil mendapatkan penghargaan sebagai PPID Pelaksana kategori "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat dengan meraih total nilai sebesar 90,2. Pada penghargaan tersebut BPTJ mendapatkan plakat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Komisi Informasi Pusat pada 11 Desember 2024. Hal ini menandakan bahwa BPTJ terus berbenah diri dalam memaksimalkan pelayanan informasi publik untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja di lingkungan Kemenhub yang telah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong seluruh jajaran Kemenhub dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.



Gambar 2. 21 Pemberian Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

2. Hari Anti Korupsi Sedunia

Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia (HAKORDIA), pada tanggal 5 Desember 2024 Inspektorat Jenderal memberikan apresiasi terhadap pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai kategori pejuang integritas. Adapun BPTJ diwakili pegawai dari terminal tipe A Poris Plawad, mendapatkan apresiasi kategori pejuang integritas.



Gambar 2. 22 Pemberian Penghargaan Apresiasi Pejuang Integritas tahun 2024

BAB III PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) secara umum telah sesuai dengan rencana. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan-permasalahan, seperti keterbatasan anggaran yang disediakan oleh APBN, menjadi permasalahan dalam pembangunan dan jaringan transportasi umum. Selain itu terkait Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), Pelaksanaan RITJ melibatkan 5 Kementerian/Lembaga dan 11 Pemerintah Daerah. BPTJ mendapatkan mandat sebagai koordinator dari pelaksanaan RITJ tersebut. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan dukungan penuh dari masing-masing instansi terkait.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan strategis, baik yang menggunakan APBN maupun non APBN untuk mengembangkan transportasi wilayah Jabodetabek. Kegiatan strategis tersebut yaitu program subsidi angkutan umum *Buy The Service* (BTS), Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg, pembangunan Halte, dan pembangunan Area Traffic Control System (ATCS).

Selain kegiatan strategis tersebut, BPTJ juga telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi untuk masyarakat yang sesuai dengan prinsip dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu selamat, aman, handal, nyaman, mudah, dan setara.

Pencapaian BPTJ selama tahun 2024 tidak terlepas dari peran aktif seluruh jajaran Pejabat Struktural, Fungsional, dan Staf di lingkungan BPTJ yang telah bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik dengan semua pihak terkait. Selain itu, dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tercapainya kegiatan yang telah direncanakan.